



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2018-2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan daerah juga diperlukan untuk dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dimana penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, terukur, terpadu, sehingga dapat dilaksanakan serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;

3. Penyusunan dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
5. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja, keselarasan visi, misi hingga strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD, maka dilakukan pula evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup penyesuaian tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan evaluasi Renstra Dinkominfo adalah mengevaluasi keselarasan dokumen Renstra dengan berbagai perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta mengevaluasi konsistensi dan keselarasan substansi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bahan rekomendasi bagi perubahan Perubahan Renstra.

Sedangkan tujuan evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kondisi daerah, dinamika yang berkembang saat ini dan prediksi yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta kebijakan daerah yang berlaku;
2. Mengetahui keselarasan Renstra dengan kebijakan serta dokumen perencanaan;
3. Mengetahui keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai kesatuan kerangka pikir perencanaan;
4. Mengukur capaian kinerja saat ini dan melihat sejauh mana tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan; dan
5. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan untuk perubahan Renstra periode berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Melakukan analisis perubahan kebijakan yang perlu diselaraskan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan evaluasi keselarasan Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan kebijakan pembangunan di tingkat pusat;
3. Melakukan evaluasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta perubahan strategi dan arah kebijakan;

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas sesuai dengan target triwulan III tahun 2020 dan target akhir Renstra tahun 2023;
5. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk perubahan Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Evaluasi Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

Bab II Gambaran Umum Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Bab ini berisi program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Bab III Analisis Perubahan Kebijakan dan Analisis Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Bab ini berisi analisis keselarasan kebijakan nasional dan daerah, analisis keselarasan Renstra Perangkat Daerah, dan analisis pencapaian target kinerja daerah.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi Renstra.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

2.1 Program dan Kegiatan

Dinkominfo Kabupaten Banyumas merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kominfo, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah : **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**. Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Dinkominfo dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud yang dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Banyumas mengampu misi 1 dengan didukung program dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Tenaga Adminitrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan Perangkat Daerah
 - d. Rapat – Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah

- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
 - i. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- a. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
 - b. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - c. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
 - d. Manajemen Komunikasi Krisis
 - e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - f. Pelayanan Informasi Publik
 - g. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - h. Layanan Hubungan Media
 - i. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4. Program Program Aplikasi Informatika
- a. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - e. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - f. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - g. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Membangun Metadata Statistik Sektoral

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Pendanaan

Kerangka pendanaan periode evaluasi tertuang dalam dokumen Renstra Dinkominfo Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada table 2.1

Tabel 2.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran				1.850.000.000		2.175.000.000		2.325.000.000		2.475.000.000		2.625.000.000		11.450.000.000
	Persentase realisasi keuangan program	%	100		100		100		100		100		100	
	Persentase realisasi fisik program	%	100		100		100		100		100		100	

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		725.000.000
	Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor	Bulan	12		12		12		12		12		12	
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12		12		12		12		12		12	
	tenaga kontrak/tenaga non PNS yang dibayar premi asuransi	Orang	43		43		43		43		43		43	
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Kali	1		1		1		1		1		1	

	Jasa instruktur kegiatan yang dibayar	Bulan	12		12		12		12		12		12	
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Bulan	12		12		12		12		12		12	
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah				200.000.000	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	1.200.000.000
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Jenis	40		40		40		40		40		40	
	Bahan Bakar Minyak yang tersedia	Liter	7680		7.680		7.680		7.680		7.680		7.680	
	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah	57		57		57		57		57		57	

	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Jenis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Cetak/ Barang Cetak yang tersedia	Eks	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Penggandaan yang tersedia	lbr	31000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	#####	
	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Pakaian Khusus dan hari - hari tertentu (Batik) yang tersedia	Buah	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Surat Kabar/Majalah yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

	Bahan/Bibit Tanaman yang tersedia	Paket	1		1		1		1		1		1	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah					150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	950.000.000
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Bulan	12		12		12		12		12		60	

Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah				500.000.000		525.000.000		575.000.000		625.000.000		675.000.000		2.900.000.000
	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	12		12		12		12		12		12	
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12		12		12		12		12		12	

	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.200.000.000	
	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah				150.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	

	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	43		43		43		43		43		43	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah				200.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	1.400.000.000					
	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	3		3		3		3		3			
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah				200.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	325.000.000	1.325.000.000					

	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah				150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100	
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		100		100		100		100		100	

Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	8		8	8	8	8	8	8	8	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				275.000.000	350.000.000	350.000.000	400.000.000	475.000.000	475.000.000	475.000.000	475.000.000	1.850.000.000

	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	%	37	51	66	81	100	100	
Pemberdayaan SDM Masyarakat Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi				75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	525.000.000
	Jumlah KIM yang di bina	Kelompok	23	24	25	26	27	27	
Fasilitasi kelembagaan masyarakat dan diseminasi informasi				100.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	675.000.000
	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Kelompok	1	1	1	1	1	1	
Kegiatan Non Fisik Dalam Rangka TMMD				100.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	650.000.000

	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Keg	3		3		3		3		3		3	
Program Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				100.000.000	-		-		-		-		-	100.000.000
	Persentase peningkatan SDM TIK dn aparatur	%	100		-		-		-		-		100	
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi				100.000.000	-		-		-		-		-	100.000.000

	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat Yang dilatih TIK	Orang	400										400	
Program Pengembangan E Government				925.000.000		1.375.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		6.800.000.000
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	%	75		80		85		90		100		100	
Fasilitasi Pengembangan Aplikasi				750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.750.000.000

	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	aplikasi	6	6	6	6	6	6	6	6	30	
Pengembangan Ekosistem E - Government				100.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	750.000.000	
	Jumlah Domain Utama	domain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Sub Domain OPD yang dikelola	sub domain	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	Jumlah domain desa yang dikelola	domain	301	301	301	301	301	301	301	301	301	
	Jumlah dokumen monitoring master plan smartcity	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	5	

Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government				75.000.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		675.000.000
	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	aturan	1		1		1		1		1		5	
	Rencana Induk SPBE	Dokumen			1								1	
	Raperbup Rencana Induk SPBE	Dokumen			1								1	
	Raperbup pengoperasian sistem informasi dan audit sistem informasi	Dokumen			1								1	
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		625.000.000

	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	Orang	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika				3.000.000.000	2.500.000.000	2.550.000.000	2.600.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	2.650.000.000	13.300.000.000
	Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	%	18	36	55	73	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data				2.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.500.000.000
	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	SKPD	5	7	8	15	17	17	17	17	17	17	17

Pemeliharaan jaringan internet dan intranet, web hosting dan updating data website				150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	950.000.000
Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik	Buah	180	207	207	207	207	207	207	207
Pengembangan data center, NOC dan data recovery center				350.000.000	350.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	1.850.000.000
Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi	item	11	11	11	11	11	11	11	11

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik				1.100.000.000		1.275.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.525.000.000		6.800.000.000
	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100		100		100		100		100		100	
	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	%	100		100		100		100		100		100	
Pengelolaan Opini dan Aduan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.750.000.000
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100	

Penyebarluasan Informasi Layanan Publik				75.000.000		75.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000		550.000.000
	Jumlah Informasi layanan publik yang dipublikasikan	Buah	72		84		96		108		120		120	
Penyelenggaraan PPID				50.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		425.000.000
	Jumlah PPID Pembantu yang Aktif	Buah	82		90		120		200		355		355	
Updating Monitoring Website				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		325.000.000
	Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	SKPD	82		90		120		175		200		200	
Informasi Layanan Cukai				100.000.000		125.000.000		125.000.000		175.000.000		175.000.000		700.000.000

	Jumlah informasi cukai dan tembakau yang disebarluaskan di masyarakat	Buah	20		25		30		35		40		40	
Operasional Videotron				200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.200.000.000
	Jumlah Videotron yang terpelihara dengan baik	Unit	1		2		2		2		2		2	
Penerbitan Tabloid Pemda				75.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		575.000.000
	Jumlah Tabloid Pemda yang diterbitkan	Eks	6000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
Pembuatan Konten Media Informasi				200.000.000		200.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		1.075.000.000

	Jumlah Konten media informasi	konten	15		17		20		23		25		100	
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000
	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali	0		1		1		1		1		4	
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah				100.000.000	350.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	475.000.000	1.675.000.000				
	Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	%	100		100		100		100		100		100	

	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas				100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000	725.000.000			
	Data dan informasi Kabupaten Banyumas yang tersusun	buku	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Banyumas				-	100.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000	500.000.000			

	Data Statistik Sektoral Kominfo yang tersusun	Dokumen	1		1		1		1		1		1	
Pengembangan Sistem Interoperabilitas				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		450.000.000
	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Unit	1		1		1		1		1		5	
Program Peningkatan Keamanan Informasi				300.000.000		375.000.000		450.000.000		550.000.000		600.000.000		2.275.000.000
	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	anek	17		17		17		17		17		17	

Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK				100.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000	700.000.000
Jumlah Audit Yang dilaksanakan	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi				100.000.000	125.000.000	125.000.000	175.000.000	175.000.000	700.000.000
Jumlah Sarana dan Prasarana peralatan sandi dan telekomunikasi dalam keadaan baik	Unit	69	69	69	69	69	69	69	69
Pembangunan dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi				50.000.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	500.000.000

	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Unit	3	7	9	11	13	13	
Optimalisasi pemungutan retribusi menara telekomunikasi				50.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	100.000.000	375.000.000
	Jumlah menara yang terpungut retribusinya	Buah	335	340	342	345	350	350	
Sub Total				7.750.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	10.000.000.000	44.750.000.000

BAB III

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1 Analisis Kebijakan PP 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merubah struktur belanja, hal ini perlu penyesuaian struktur belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang semula struktur belanjanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016. Struktur APBD menurut PP Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 terdiri dari:

I. Pendapatan Daerah:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer (untuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005: Dana Perimbangan)
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

II. Belanja Daerah:

- a. Urusan Pemerintah Daerah
- b. Organisasi
- c. Program
- d. Kegiatan
- e. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan sosial
- f. Belanja Modal
- g. Belanja Tidak Terduga
- h. Belanja Transfer
 - Belanja Bagi hasil dan

- Belanja Bantuan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, untuk belanja terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan belanja langsung terdiri dari program dan kegiatan yang dirinci menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

III. Pembiayaan Daerah:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan
- c. Pembiayaan Neto (A-B)

Perubahan struktur belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Perubahan Struktur Belanja berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dan PP 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 & Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintah - Organisasi - Program - Kegiatan
1. Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bansos f. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan g. Belanja Tidak Terduga 	1. Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bansos
2. Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> Program Kegiatan a. Belanja Pegawai 	2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak terduga 4. Belanja Transfer <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 & Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	b. Belanja Bantuan Keuangan

Pokok-pokok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pemerintah daerah harus memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
2. Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
3. Alokasi anggaran infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25%;
4. Alokasi anggaran peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurang 0.16 % dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota;
5. Alokasi anggaran penguatan APIP sebesar 0.3%-0.9% dari total belanja daerah

Apabila pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut maka Menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DTU setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri Teknis.

3.1.2 Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (*mapping*) pada level urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Regulasi peraturan tersebut menjelaskan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang di gunakan dalam

penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah menjadi pedoman bagi seluruh Pemda untuk mewujudkan, *single codebase* (berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode), juga sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (*mapping*) pada level urusan OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Langkah-langkah pemetaan dalam penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Renstra Dinkominfo periode 2018-2023
2. Pemetaan dilakukan dengan menyandingkan antara nomenklatur kegiatan pada Renstra Dinkominfo periode 2018-2023 yang berlaku dengan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Hasil dari penyandingan selanjutnya dijadikan bahan penyesuaian program pada Renstra yang masih berlaku dengan nomenklatur program yang baku dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019;
4. Hasil pemetaan menjadi bahan referensi bagi pemutakhiran lampiran Permendagri 90 tahun 2019, penyusunan Renstra Perubahan untuk periode 2018-2023, serta penyusunan RKPD dan APBD periode selanjutnya.
5. Dalam hal konsideran, Permendagri 90 Tahun 2019 tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai peraturan tertinggi di atasnya, sehingga cukup menyulitkan daerah.

6. Sedangkan Nomenklatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 akan diamanatkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah terkait Bagan Akun Standar (BAS) yang masih dalam proses penyusunan.

Berikut merupakan tabel keselarasan program, kegiatan dan indikator sesuai pemutakhiran Kepmendagri yang ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL
KESELARASAN INDIKATOR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

RENSTRA		PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019		Usulan Indikator Baru	Rumus
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	Persentase kelembagaan masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik /Jumlah Perangkat Daerah X100%
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan masyarakat yang diberdayakan dalam	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan masyarakat yang diberdayakan dalam	Jumlah kelembagaan masyarakat yang diberdayakan dalam	Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi

			pengelolaan informasi dan komunikasi publik		pengelolaan informasi dan komunikasi publik	pengelolaan informasi dan komunikasi publik	publik
Pemberdayaan SDM Masyarakat Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah KIM yang dibina	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang dibina	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang dibina	Jumlah KIM yang dibina	Jumlah KIM yang dibina
Fasilitasi kelembagaan masyarakat dan diseminasi informasi	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Jumlah FK Metra yang difasilitasi
Kegiatan Non Fisik Dalam Rangka TMMD	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang difasilitasi
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1. Rasio Lapak aduan publik berbasis IT 2. Persentase Perangkat	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Rasio Lapak aduan publik berbasis IT 2. Persentase Perangkat	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Rasio Lapak aduan publik berbasis IT 2. Persentase Perangkat	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi

	Daerah yang memberikan akses informasi publik		Daerah yang memberikan akses informasi publik		Daerah yang memberikan akses informasi publik	publik	publik /Jumlah Perangkat Daerah X100%
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	1. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	Jumlah perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik
Pengelolaan Opini dan Aduan	Jumlah aduan masyarakat	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah aduan masyarakat	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah aduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat

	yang ditindaklanjuti		yang ditindaklanjuti		yang ditindaklanjuti	yang ditindaklanjuti	yang ditindaklanjuti
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah komunikasi krisis yang selesai ditangani	Jumlah komunikasi krisis yang selesai ditangani
Updating Monitoring Website	Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	1. Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website 2. Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	1. Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website 2. Jumlah media komunikasi publik yang dikelola
Penyebarluasan Informasi Layanan Publik	Jumlah Informasi layanan publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi layanan publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi layanan publik	Jumlah Informasi layanan publik	Jenis informasi layanan publik yang

	yang dipublikasikan		yang dipublikasikan		yang dipublikasikan	yang dipublikasikan	dipublikasikan
Operasional Videotron	Jumlah Videotron yang terpelihara dengan baik	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Videotron yang terpelihara dengan baik	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Videotron yang terpelihara dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara
Pembuatan Konten Media Informasi	Jumlah Konten media informasi	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten media informasi	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten media informasi	Jumlah Konten yang dikemas	Jumlah Konten yang dikemas
Penerbitan Tabloid Pemda	Jumlah Tabloid Pemda yang diterbitkan	Layanan Hubungan Media	Jumlah Tabloid Pemda yang diterbitkan	Layanan Hubungan Media	Jumlah Tabloid Pemda yang diterbitkan	Jumlah layanan hubungan media yang dilaksanakan	Jumlah layanan hubungan media yang dilaksanakan
Penyelenggaraan PPID	Jumlah PPID Pembantu yang Aktif	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang Aktif	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang Aktif	1. Jumlah PPID Pembantu di OPD yang Aktif 2. Jumlah PPID Pembantu di Desa yang Aktif	1. Jumlah PPID Pembantu di OPD yang Aktif 2. Jumlah PPID Pembantu di Desa yang Aktif
Program	Persentase	Program Aplikasi	Persentase	Program Aplikasi	Persentase	1. Persentase	1. Jumlah

Pengembangan E Government	Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	Informatika	Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	Informatika	Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan PublikX100% 2. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda/Jumlah OPDX100%
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah kegiatan mewujudkan kota cerdas yang dilaksanakan 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola sistem	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah kegiatan mewujudkan kota cerdas yang dilaksanakan 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola sistem	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola E-Government	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Layanan Publik secara online dan terintegrasi

			informasi secara baik 3. Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik		informasi secara baik 3. Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik		
Pengembangan Ekosistem E - Government	Jumlah dokumen monitoring master plan smartcity	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring master plan smartcity	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring master plan smartcity	1. Jumlah dokumen masterplan kota cerdas yang dikelola 2. Jumlah pengembangan ekosistem kota cerdas yang difasilitasi	1. Jumlah dokumen masterplan kota cerdas yang dikelola 2. Jumlah pengembangan ekosistem kota cerdas yang difasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	Jumlah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara	Jumlah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara

Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government	Rencana Induk SPBE	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Induk SPBE	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Induk SPBE	Jumlah Rencana Induk SPBE yang dibuat	Jumlah rencana Induk SPBE yang disusun
Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government	Raperbup Rencana Induk SPBE	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Raperbup Rencana Induk SPBE	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Raperbup Rencana Induk SPBE	Jumlah Raperbup Rencana Induk SPBE yang dibuat	Jumlah Raperbup Rencana Induk SPBE yang disusun
Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	Jumlah aturan bidang TIK yang disusun
Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government	Raperbup pengoperasian sistem	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam	Raperbup pengoperasian sistem	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam	Raperbup pengoperasian sistem	Jumlah Raperbup pengoperasian	Jumlah Raperbup pengoperasian

	informasi dan audit sistem informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	informasi dan audit sistem informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	informasi dan audit sistem informasi	sistem informasi dan audit sistem informasi yang dibuat	sistem informasi dan audit sistem informasi yang disusun
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	1. Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK 2. Jumlah Pelatihan SDM TIK yang dilaksanakan	1, Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK 2, Jumlah Pelatihan SDM TIK yang dilaksanakan
Pengembangan data center, NOC dan data recovery center	Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi	1. Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi 2. Jumlah Pusat Data yang dikelola	1, Jumlah Elemen Data Center, NOC dan DRC yang terstandarisasi 2, Jumlah Pusat Data yang dikelola

Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	Program Aplikasi Informatika	1, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2, Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	1, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2, Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	1, Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/ Jumlah Layanan PublikX100% 2, Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda/ Jumlah OPDX100%
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	Jumlah OPD yang terhubung Fiber Optik (FO)
Pemeliharaan jaringan internet dan intranet, web hosting dan	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang	Jumlah jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi

updating data website	terkoneksi dengan baik		terkoneksi dengan baik		terkoneksi dengan baik	terkoneksi dengan baik	dengan baik
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Subdomain yang dikelola secara baik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Subdomain yang dikelola secara baik	Jumlah Nama Domain yang dikelola	Jumlah Jumlah Nama Domain yang dikelola
Pengembangan Ekosistem E - Government	1. Jumlah Domain Utama 2. Jumlah domain desa 3. Jumlah Sub Domain OPD	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Domain Utama 2. Jumlah domain desa 3. Jumlah Sub Domain OPD	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Domain Utama 2. Jumlah domain desa 3. Jumlah Sub Domain OPD	1. Jumlah Domain Utama yang dikelola 2. Jumlah sub domain OPD yang dikelola 3. Jumlah domain desa yang dikelola	1, Jumlah domain utama yang dikelola 2, Jumlah sub domain OPD yang dikelola 3, Jumlah domain desa yang dikelola
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	1. Persentase ketersediaan data informasi dan statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Persentase ketersediaan data informasi dan statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Persentase ketersediaan data informasi dan statistik	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik	Jumlah data informasi dan statistik daerah yang

	daerah 2. Persentase keterisian Daftar Informasi Publik		daerah 2. Persentase keterisian Daftar Informasi Publik		daerah 2. Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	daerah	tersedia/Jumlah data informasi dan statistik daerahX100%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik Sektoral Kominfo yang tersusun	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik Sektoral Kominfo yang tersusun	Data Statistik Sektoral Kominfo yang tersusun	Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersusun
Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas	Data dan informasi Kabupaten Banyumas yang tersusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Data dan informasi Kabupaten Banyumas yang tersusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Data dan informasi Kabupaten Banyumas yang tersusun	1. Jumlah forum data yang mendukung penguatan statistik sektoral yang disusun 2. Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dihasilkan	1, Jumlah forum data yang mendukung penguatan statistik sektoral yang disusun 2, Jumlah Buku Statistik Sektoral yang disusun
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten	Data Statistik Sektoral Kominfo yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Data Statistik Sektoral Kominfo yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Data Statistik Sektoral Kominfo yang	Jumlah Forum Data yang mendukung	Jumlah forum data yang mendukung

Banyumas	tersusun	Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	tersusun	Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	tersusun	Penguatan Statistik Sektoral	penguatan statistik sektoral yang disusun
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Data Statistik Sektoral yang tersusun	Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersusun
Pengembangan Sistem Interoperabilitas	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun
Program Peningkatan Keamanan Informasi	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Peringkat keamanan informasi pemerintah
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	Jumlah pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang

		Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			dikelola
Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK	Jumlah Audit Yang dilaksanakan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Audit Yang dilaksanakan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Audit Yang dilaksanakan	Jumlah pengamanan informasi yang difasilitasi	Jumlah pengamanan informasi yang difasilitasi
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana peralatan sandi dan telekomunikasi dalam keadaan baik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana peralatan sandi dan telekomunikasi dalam keadaan baik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana peralatan sandi dan telekomunikasi dalam keadaan baik	Jumlah tanda tangan elektronik (TTE) yang tersedia	Jumlah tanda tangan elektronik (TTE) yang tersedia
Pembangunan dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Jumlah repeater telekomunikasi dalam keadaan baik

Optimalisasi pemungutan retribusi menara telekomunikasi	Jumlah menara yang terpungut retribusinya	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara yang terpungut retribusinya	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara yang terpungut retribusinya	Dihapus	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.Persentase realisasi keuangan program 2.Persentase realisasi fisik program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan 3. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan 3. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Hasil penilaian atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan 3. Persentase realisasi fisik program Penunjang	1. Hasil penilaian atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 2. Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah anggaran kali 100% 3. Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan

						Urusan Pemerintahan	Pemerintahan
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Kesesuaian program dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	1. Jumlah program dalam renstra dibagi jumlah program dalam renja dikali 100% 2. Jumlah program dalam renja dibagi jumlah program dalam APBD dikali 100%

Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Hasil penilaian atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 2.Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 3.Jumlah publikasi informasi perencanaan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.Jumlah dokumen renstra yang disusun 2.Jumlah dokumen renstra yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

		Kegiatan Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi keuangan yang tersedia
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya
Kegiatan Penyediaan tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya 2. Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya 2. Jasa transaksi keuangan yang dibayar 3. Honor	Honor pengelola keuangan daerah perangkat daerah yang dibayarkan	Honor pengelola keuangan daerah perangkat daerah yang dibayarkan

					pengelola Keuangan Daerah Perangkat		
Kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan				
		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia

<p>Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor perangkat daerah</p>	<p>1.Alat Tulis Kantor yang tersedia 2. Perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia 3.Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia 4.Cetak dan penggandaan yang tersedia 5.Alat listrik dan elektronik yang tersedia</p>	<p>Kegiatan Administrasi Umum</p>	<p>Tersedianya pelayanan Administrasi Umum</p>	<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Tersedianya pelayanan Administrasi Umum</p>	<p>Tersedianya pelayanan Administrasi Umum</p>	<p>Pelayanan administrasi umum yang tersedia</p>
		<p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor yang tersedia 2. Perangko,</p>	<p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor yang tersedia 2. Perangko,</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</p>

			materai dan benda pos lainnya yang tersedia		materai dan benda pos lainnya yang tersedia		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang tersedia	Cetak dan penggandaan yang tersedia	Cetak dan penggandaan yang tersedia
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bahan logistik kantor yang tersedia	Bahan logistik kantor yang tersedia
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan yang tersedia	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia
				Penyediaan Jasa Peralatan dan	Peralatan dan perlengkapan	Bahan perlengkapan	Bahan perlengkapan

				Perlengkapan Kantor	kantor yang tersedia	kerja yang tersedia	kerja yang tersedia
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1.Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar 2.Jasa transaksi keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia

	yang dibayar						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya
Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

						yang tersedia	yang tersedia
Kegiatan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas Perangkat Daerah	1. gedung pemerintah dalam kondisi baik 2. Biaya pemeliharaan gedung/kantor yang terbayarkan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1. Gedung pemerintah dalam kondisi baik 2. Biaya pemeliharaan gedung/kantor yang terbayarkan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Gedung pemerintah dalam kondisi baik 2. Biaya pemeliharaan gedung/kantor yang dibayarkan	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Gedung pemerintah dalam kondisi baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. Kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	1. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	1. Kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik 2. Kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik
Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	1. Peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor perangkat daerah dalam	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Perlengkapan kantor perangkat daerah dalam	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

kantor Perangkat Daerah	2.Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan		kondisi baik	Bangunan Lainnya	kondisi baik	atau Bangunan dalam kondisi baik	atau Bangunan dalam kondisi baik
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik
				Pemeliharaan Mebel	Mebel dalam kondisi baik	Mebel dalam kondisi baik	Mebel dalam kondisi baik
Informasi Layanan Cukai	Jumlah informasi cukai dan tembakau yang disebarluaskan di masyarakat	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi cukai dan tembakau yang disebarluaskan di masyarakat	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah informasi cukai dan tembakau yang disebarluaskan di masyarakat	Jumlah informasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan/atau	Jumlah informasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masyarakat dan/atau

						pemangku kepentingan (DBHCHT)	pemangku kepentingan (DBHCHT)
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

3.1.3 Analisis Kebijakan Daerah dan Keselarasan Program Kegiatan Renstra

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kembali membawa perubahan fundamental dalam tata kelola perangkat daerah di Indonesia. Jika dilihat kembali semangat dari penataan organisasi perangkat daerah sejak masa reformasi, maka akan diketahui bahwa semangat efisiensi menjadi tonggak utama penataan. Lebih lagi jika dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Demikian pula, tumbuhnya iklim demokrasi lokal dengan Pemiluakada sebagai kebijakan 'mercusuar-nya', memungkinkan pemda untuk dapat membentuk perangkat daerahnya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Penataan perangkat daerah di Indonesia selalu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 di masa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2012 tentang Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6 ayat (2) terkait dengan kriteria variabel dan indikator penyusunan perangkat daerah dimana salah satunya adalah menyangkut indikator

jumlah anggaran dan pendapatan daerah, maka dipandang perlu untuk membahas kapasitas perangkat daerah dilihat dari aspek keuangannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa aspek-aspek yang dapat dijadikan parameter dalam membahas tentang kapasitas perangkat daerah ini meliputi aspek-aspek: a. Aspek kelembagaan; b. Aspek sumber daya manusia; c. Aspek keuangan; dan d. Aspek kebijakan.

Penataan organisasi merupakan wujud perubahan organisasi dengan cara menata kembali organisasi, baik sumber daya manusianya maupun strukturnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan organisasi vertikal diartikan memperpanjang atau memperpendek tingkatan suatu organisasi, sedangkan penataan organisasi horizontal dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah bagian atau bidangnya.

Penataan organisasi di Kabupaten Banyumas telah dilakukan pada Tahun 2019 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Dinkominfo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Daerah, memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan bidang urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Dinkominfo tidak menambah struktur baru, tetapi hanya merubah nomenklatur Bidang Aplikasi Informatika, Seksi Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas dan Seksi Statistik.

Perubahan penataan organisasi pada Dinkominfo ini tidak merubah program pada APBD Dinkominfo tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel

Keselarasan Program dalam Renstra dan APBD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PROGRAM DALAM RENSTRA 2018-2023		PROGRAM DALAM APBD 2020	KESELARASAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Selaras
2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Selaras
3	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Selaras
4	Program Aplikasi Informatika	4	Program Aplikasi Informatika	Selaras
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Selaras
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Selaras

3.2 Analisis Keselarasan Renstra Perangkat Daerah

3.2.1 Analisis Keselarasan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Keselarasan antara visi, misi, dengan tujuan dan sasaran diperlukan supaya tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi. Evaluasi tujuan dan sasaran dilakukan dengan menginventarisasi rumusan tujuan, sasaran dan mengelompokannya sesuai misi masing-masing. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian dengan ketentuan perumusan tujuan dan sasaran sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dan literatur terkait, serta rekomendasi untuk tujuan dan sasaran selanjutnya.

Tabel

Keselarasan Tujuan, Sasaran pada Misi yang diampu Dinkominfo dengan Rekomendasi Perubahannya

MISI	TUJUAN BUPATI	SASARAN BUPATI	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Renstra Dinkominfo 2018-2023				
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan Tata Kelola E-Government
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan Keamanan Informasi
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Rekomendasi Renstra Dinkominfo 2018-2023				
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan Keamanan Informasi
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral

3.2.2 Analisis Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Evaluasi strategi dilakukan dengan menyandingkan strategi dalam Renstra Dinkominfo dengan permasalahan dan isu strategis Renstra Dinkominfo, serta strategi RPJMD. Perumusan strategi memperhitungkan semua potensi,

peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul perlu dipersiapkan, baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Sedangkan, evaluasi arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2020.

Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi yang diturunkan dalam arah kebijakan seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI I : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keterbukaan informasi publik.	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik.	Optimalisasi pengelolaan e Government dengan meningkatkan pengelolaan informasi publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintah daerah. • Optimalisasi kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral.	Optimalisasi pengelolaan e Government dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral.
Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pemanfaatan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pengelolaan e Government dengan meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan dan jangkauan telekomunikasi. • Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam

			penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	Meningkatkan Keamanan Informasi	Optimalisasi pengelolaan e Government dengan meningkatkan pengelolaan keamanan data dan sistem informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan keamanan data dan sistem informasi.

Sedangkan untuk strategi yang diturunkan dalam program dan kegiatan telah diselaraskan sesuai pemutakhiran Kepmendagri 90 yang ditunjukkan pada cascading Dinkominfo. (*Lampiran 1*)

3.2 Analisis Pencapaian Target Kinerja

Pada prinsipnya evaluasi capaian Renstra adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, dengan mengukur capaian kinerja menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati.

Evaluasi Capaian kinerja program pada bidang Komunikasi dan Informatika bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Capaian Kinerja Program Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d TW III	Status Capaian 2020	Tingkat Capaian RKPD 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwulan III
						Target 2020	Realisasi 2020 s.d Triwulan III				
Aspek Pelayanan Umum											
Urusan Komunikasi dan Informatika											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Program Pengembangan E Government											
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	non kumulatif	%	100	75	80	80	100	●	80	▶
Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika											
2	Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	non kumulatif	%	100	18	36	30	83.33	▶	30	▼
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik											
3	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●
4	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa											
5	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	non kumulatif	%	100	37	51	85	166.67	●	85	▶
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran											
6	Persentase realisasi keuangan program	non kumulatif	%	100	25	100	25	25	▼	25	▼
7	Persentase realisasi fisik program	non kumulatif	%	100	25	100	25	25	▼	25	▼
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah											
8	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●
9	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 dari 9 target indikator, ada sebanyak 4 (44,44%) target indikator berstatus telah tercapai, dan sebanyak 2 (22,22%) target indikator akan tercapai, dan 3 (33,33%) target indikator perlu perhatian/upaya keras.

Selanjutnya evaluasi capaian kinerja program pada bidang Statistik bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian Kinerja Program Bidang Statistik
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian RKPd 2020 s.d TW III	Status Capaian 2020	Tingkat Capaian RKPd 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwulan III
						Target 2020	Realisasi 2020 s.d. Triwulan III				
Aspek Pelayanan Umum											
Urusan Statistik											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah											
1	Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●
2	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	non kumulatif	%	100	100	100	100	100	●	100	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 dari 2 target indikator, ada sebanyak 2 (100,00%) target indikator berstatus telah tercapai.

Sedangkan evaluasi capaian kinerja program pada bidang Persandian bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian Kinerja Program Bidang Persandian
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian RKPd 2020 s.d TW III	Status Capaian 2020	Tingkat Capaian RKPd 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwulan III
						Target 2020	Realisasi 2020 s.d. Triwulan III				
Aspek Pelayanan Umum											
Urusan Persandian											
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Program Peningkatan Keamanan Informasi											
1	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	non kumulatif	aneq	17	17	17	17	100	●	100	●

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan tahun 2020 dari 1 target indikator, ada sebanyak 1 (100,00%) target indikator berstatus telah tercapai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis perubahan kebijakan dan analisis pencapaian target kinerja yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Dinkominfo Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan urusan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinkominfo Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik;

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinkominfo Kabupaten Banyumas adalah sebagaiberikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan Keamanan Informasi;
3. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir s.d 2023
Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	.	2,75	3,1	3,2	3,3	3,3
	Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	%	80	80	90	100	100
	Meningkatkan Keamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	64	64	86	100	100
Meningkatkan keterbukaan informasi publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		94	95	96	97	97
	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	%	90	90	100	100	100
	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	%	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan dapat dilakukan antara lain karena terjadi perubahan yang mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional antara lain:

1. PP No 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi dasar perubahan susunan organisasi, tugas dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang dijabarkan ke Peraturan Bupati
6. Kejadian luar biasa Pandemi Covid 19

Perubahan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang dilakukan didasari atas hasil Evaluasi Renstra. Evaluasi Renstra menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi

Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

4.2 Rekomendasi

1. Perubahan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang dilakukan didasari hasil Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah, Analisis Keselarasan RPJMD, Analisis Pencapaian Target Kinerja Daerah.
2. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain :
 - a. Program kegiatan pembangunan sesuai program kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Sasaran dan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten Banyumas sesuai dengan perkembangan kondisi provinsi dan nasional.